



**BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asnawi Abdullah

Jabatan : Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Budi G. Sadikin

Jabatan : Menteri Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Budi G. Sadikin

Jakarta, Desember 2025
Pihak Pertama,


Asnawi Abdullah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Tujuan 1: Masyarakat sehat di setiap siklus hidup	IT 1 Usia Harapan Hidup Sehat	63,0 Tahun
II	Tujuan 2: Layanan Kesehatan yang baik, adil dan terjangkau	IT 2 Cakupan Layanan Kesehatan Esensial	55 (Indeks)
III	Tujuan 4: Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang efektif, adil, dan berkelanjutan	IT 4 Rasio belanja kesehatan per kapita terhadap usia harapan hidup sehat	2,2 (Rasio)
	Sasaran Strategis 4.1 Meningkatnya kualitas tata kelola dan pembiayaan kesehatan di pusat dan daerah	ISS 26 Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang menyelaraskan Perencanaan Pembangunan dan mencapai target Tahunan Pembangunan**	
		ISS 27 Pengeluaran Kesehatan Total per Kapita**	
		ISS 28 Skala investasi di sektor kesehatan	0,7 miliar USD
	024.DS. Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan		
	Sasaran Program: Meningkatnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah	IKP 26.2 Persentase daerah yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional	15%
		IKP 26.3 Persentase Kabupaten/Kota dengan capaian SPM Kesehatan minimal 90%	50%

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		IKP 26.4 Nilai kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan	83
	Sasaran Program: Meningkatnya kecukupan, efektifitas, efisiensi, keadilan dan keberlanjutan pendanaan kesehatan	IKP 27.3 Persentase kabupaten/kota yang mengikuti bauran belanja ideal di sektor kesehatan	10%
		IKP 28.1 Persentase kenaikan investasi langsung di sektor kesehatan	19%
		IKP 28.2 Persentase pencapaian target global kesehatan pada tingkat nasional	50%
VI	Tujuan 6: Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien	IT 6 Nilai Good Public Governance Kementerian Kesehatan**	
	Sasaran Strategis 6.1 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan	ISS 33 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan*	91,96 (Nilai)
	024.WA. Program Dukungan Manajemen		
	Sasaran Program: Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan	IKM 33.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	77 (Nilai)
		IKM 33.2 Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	92,35 (Nilai)
		IKM 33.3 Indeks Kualitas SDM Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	81 (Nilai)

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		IKM 33.4 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	95%
		IKM 33.5 Nilai Maturitas Manajemen Risiko Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	3,95 (Nilai)
		IKD 33.1 Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	96%

Keterangan:
 * : Kontributor (Indikator Kinerja dan Target ditampilkan)
 ** : Kolaborator (Indikator Kinerja dan Target tidak ditampilkan)
 IKM : Indikator Kinerja Mandatory Program Dukungan Manajemen
 IKD : Indikator Kinerja Direktif Pimpinan

Program	Anggaran
1. Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Rp. 149.911.300.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 63.517.960.000
3. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Rp. 11.479.560.000
Total Anggaran DIPA Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Rp. 224.908.820.000

Pihak Kedua,

Jakarta, Desember 2025
Pihak Pertama,


Budi G. Sadikin


Asnawi Abdullah